

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 379-390

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15532789>

Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Siti Shafa Halizatunnisa, Rika Safitri, Qoorie Handayani Asysyabani, Fajwah Rahma Ramadhani, Adinda putri Iswandini, , Bagas Nabil Karim, Viqram Januar Gawi Kaliky, Dian Herdiana

Faculty of Syaria and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: SitiShafa093@gmail.com, seccofme10@gmail.com, qoorie.handayani@gmail.com, fajwahrahma9a@gmail.com, adindaiswandini@gmail.com, bagasss2424@gmail.com, kalikygawi@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

Alamat : Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia. Bansos atau bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya yang ditujukan kepada masyarakat yang rentan dan miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari APBN, Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan resmi kementerian sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam berbagai konteks. Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis efektivitas bantuan sosial, serta mengevaluasi bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Secara keseluruhan, bantuan sosial (bansos) berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, namun turut membawa dampak pada peningkatan beban fiskal negara. Untuk itu, reformasi kebijakan bansos harus difokuskan pada peningkatan efisiensi, penguatan sistem pengelolaan, dan pengendalian beban fiskal agar kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Kemiskinan, Efektivitas Kebijakan, APBN, BPS.

Abstract

Poverty is one of the main problems faced by Indonesia. Bansos or social assistance is assistance provided by the government and other institutions aimed at vulnerable and poor communities. This study uses a qualitative descriptive approach by utilizing data from the APBN, the Central Statistics Agency (BPS), and official ministry reports as the main sources. Data collection was carried out through document studies and interviews, while data analysis was carried out using a comparative analysis approach to compare the effectiveness of social assistance policies in various contexts. The purpose of writing this article is to analyze the effectiveness of social assistance, as well as to evaluate bansos in overcoming poverty in Indonesia. Overall, social assistance (bansos) plays an important role in reducing poverty levels in Indonesia, but also has an impact on increasing the country's fiscal burden. Therefore, social assistance policy reform must focus on increasing efficiency, strengthening the management system, and controlling the fiscal burden so that this policy is not only temporary.

Keywords : Social Assistance, Poverty, Policy Effectiveness, State Budget, BPS.

Article Info

Received date: 15 May 2025

Revised date: 20 May 2025

Accepted date: 27 May 2025

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Berdasar pada hasil Badan Pusat Statistik (BPS) di awal tahun 2024, jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan,

yaitu mencapai 9,03 persen. Data ini memperlihatkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,33 persen dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya memperkuat program bantuan sosial (bansos) guna mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup.¹

Bantuan sosial, atau bansos, merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Berdasarkan PPRI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bansos mencakup berbagai bentuk, seperti barang, uang, atau jasa, yang diperuntukkan bagi individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang menghadapi kesulitan ekonomi atau berisiko mengalami permasalahan sosial.² Selain itu, PMDN No. 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa anggaran untuk bantuan sosial diarahkan pada pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang secara selektif dan tidak berkelanjutan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap potensi risiko sosial, meskipun dalam kondisi tertentu bantuan dapat diberikan secara berkelanjutan.³

Bantuan sosial (bansos) ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada tahun 2024, kebijakan bansos difokuskan sebagai upaya mereduksi angka kemiskinan yang dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, seperti krisis dan bencana alam. Pada sidang yang membahas penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang berlangsung pada Jumat, 5 April 2024, Muhadjir menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,39 persen, dengan target penurunan hingga sekitar 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah mengintensifkan program bansos sebagai langkah mitigasi terhadap dampak bencana El Nino yang terjadi pada akhir tahun 2023 hingga awal 2024. Bencana ini memengaruhi produksi pangan, terutama beras, yang berujung pada lonjakan harga bahan pokok dan berdampak pada masyarakat miskin serta rentan.⁴

Pemerintah menyediakan berbagai jenis bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan untuk para pekerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program bansos menjadi hal yang krusial. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan optimal.⁵

Pemerataan yang adil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan aspek yang sangat penting. Bantuan perlu dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan, tanpa dipengaruhi oleh faktor kedekatan politik, hubungan pribadi, atau distribusi yang tidak mempertimbangkan tingkat kerentanan. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menekankan bahwa pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan memiliki peran krusial. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses penyaluran bansos tetap akurat dan tepat sasaran, sehingga bantuan benar-benar menjangkau pihak-pihak yang membutuhkannya.⁶

Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung perorangan, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan dalam mencukupi kebutuhan dasar dan memperbaiki kualitas hidup. Salah satu inisiatif penting adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu fokus pada keluarga pra sejahtera yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini terutama diperuntukkan bagi keluarga dengan anggota yang memiliki kondisi rawan, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan kepada Keluarga

¹ "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen," BADAN PUSAT STATISTIK, 2024.

² "Problematisa Bantuan Sosial Dan DTKS," Ombudsman RI, 2024.

³ Mijensmg, "Sering Dengar Kata 'BANSOS' ? Apa Itu 'BANSOS' ?," mijen semarang kota, 2024.

⁴ Mimi Kartika, "Empat Menteri Respons Soal Penyaluran Bansos," mkri.id, 2024.

⁵ "Bantuan Sosial Di Tahun 2024," indonesia baik, 2024, <https://www.indonesiabaik.id/infografis/bantuan-sosial-di-tahun-2024>.

⁶ Maya Atika, "Mensos Tri Rismaharini: Verifikasi DTKS Diperbarui Setiap Bulan Demi Tepatnya Penyaluran Bantuan Sosial," demakbicara.com, 2024.

Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS. Bantuan ini berupa penyediaan pangan senilai Rp. 200. 000 setiap bulan, yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan untuk warga yang sedang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, khususnya dalam situasi krisis ekonomi atau bencana. Sementara itu, Bantuan Sosial Beras (BSB) memberikan bantuan beras gratis sebanyak 10 kg per bulan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS.⁷

Pemerintah menerapkan berbagai strategi agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, seperti pemutakhiran data penerima, digitalisasi penyaluran, dan pengawasan ketat. Teknologi digunakan untuk meningkatkan transparansi, sementara pengawasan melibatkan masyarakat, akademisi, dan media. Penyaluran untuk kelompok rentan dilakukan secara langsung jika perlu. Sinergi antar lembaga dan evaluasi berkala menjadi kunci efektivitas, agar bansos benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.⁸

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara dan perekonomian. Peningkatan anggaran bansos, seperti yang terjadi pada 2024 dengan alokasi mencapai Rp496,8 triliun, menambah beban pengeluaran negara namun berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan mendorong konsumsi masyarakat, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, jika tidak dikelola dengan baik, bansos juga bisa menimbulkan tekanan inflasi dan membebani fiskal dalam jangka panjang, terutama bila terus meningkat tanpa didukung penerimaan negara yang memadai. Efektivitas bansos sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan pengawasan, karena penyaluran yang tidak tepat hanya memperbesar pengeluaran tanpa memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.⁹

Rumusan masalah yang dapat diangkat dalam artikel ini adalah efektivitas kebijakan bantuan sosial, serta evaluasi bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis efektivitas bantuan sosial, serta mengevaluasi bansos dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Selain itu, dapat memberikan wawasan umum bagi masyarakat mengenai optimalisasi program bansos guna meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari APBN, Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan resmi kementerian sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam berbagai konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Bantuan Sosial

Sebagai cara pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan bentuk mensejahterakan masyarakat dan negara, beberapa hal didalamnya terkait perbandingan, jenis-jenis, tujuan, sasaran, beban fiskal dan lain sebagainya yang muncul dari adanya Bantuan Sosial.

Perbandingan Data Bantuan Sosial 2023 & 2024 menilai efisiensi

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan 2023

Bantuan Sosial 2023				
Negara	Rencana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan)	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan	Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) (Rp)	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) (Rp)

⁷ Sean Anggiatheda Sitorus, "Pengertian Bansos, Jenis Dan Tujuannya," antara news, 2024.

⁸ Info Hukum, "Alur Pemberian Bantuan Sosial (Bansos): Proses, Tahapan, Dan Mekanisme Penyaluran," info hukum, n.d.

⁹ Dewi Restu Mangeswuri, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengendalian Inflasi," *Info Singkat* 16, no. 3 (2024).

		(Bantuan Pangan)		
INA	105.549.489	103.102.744	44.745.548.200.000	43.685.408.400

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan 2024

Bantuan Sosial 2024				
Negara	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan)	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Pangan)	Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) (Rp)	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) (Rp)
INA	75.073.000	73.597.540	45.043.800.000.000	44.158.524.000.000

(Sumber: Badan Pusat Statistik)¹⁰

Bantuan sosial (BANSOS) merupakan bentuk kebijakan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Terjadi perubahan mengenai jumlah keluarga dan nominal anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk masyarakat Indonesia. Dalam web Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat pada Tahun 2023 nominal anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah antara jumlah keluarga yang tinggi dan anggaran yang tersedia, sedangkan pada Tahun 2024 terjadi pengurangan jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial tetapi anggaran bertambah sekitar Rp. 1 Triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi penggunaan anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) pada Tahun 2024 akan diumumkan pada bulan Februari 2024, bertepatan dengan memasuki masa pemilu. Ia menilai bahwa tidak ada perubahan signifikan antara anggaran perlinsos dan bansos Kementerian Sosial untuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pemilu Presiden pada hari Jumat. (5/4/2024)¹¹

Terdapat juga alasan lainnya mengapa anggaran pada Tahun 2023 lebih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Tahun 2024, yaitu karena adanya koordinasi dengan perbankan perihal penyaluran bantuan sosial melalui via bank. Beberapa alasan mendasar terjadinya koordinasi tersebut antara lain masyarakat yang mengeluhkan sulitnya masyarakat melakukan pencairan bantuan sosial melalui bank, disebagian wilayah sangat jarang tersedia bank, bahkan jika ingin menggunakan bank, diharuskan menyewa transportasi yang melebihi harga bantuan sosial yang diberikan.

Oleh sebab itu terjadi komunikasi antara MenKeu dan pihak perbankan, namun setelah itu seluruh anggaran dan efektifitas sasaran berjalan seperti tahun – tahun sebelumnya. Hal ini membantu memperbaiki penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, mudah untuk di akses dan membantu masyarakat agar mendapatkan haknya. Pada akhirnya untuk sasaran wilayah terpencil yang sulit mengakses ATM, pemberian bantuan sosial dikirim melalui PT Pos. Namun, dana akan tetap di transfer ke rekening penerima sebagai bukti.¹²

Jenis-Jenis, Tujuan Sasaran dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Di Indonesia, bantuan sosial hadir dalam beragam bentuk yang dirancang untuk merespons permasalahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Jenis-jenis bansos yang paling menonjol antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan untuk para pekerja. Masing-masing program tersebut memiliki

¹⁰ “Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Provinsi, 2023,” badan pusat statistik, n.d.

¹¹ Dwi Rahmawati, “Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos Melonjak Tajam Jadi Rp 22,5 T Pada 2024,” detik news, n.d.

¹² Brigitta Belia Permata Sari, “Risma Jelaskan Alasan Bansos 2023 Tak Cair Januari-Ferbuari Seperti 2024,” detik news, n.d.

sistem penyaluran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tujuan serta kelompok penerima yang ditargetkan.

Adapun program yang pertama yaitu, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan memberikan akses terhadap kebutuhan pangan bagi masyarakat kurang mampu melalui sistem non-tunai, seperti penggunaan kartu elektronik atau kartu debit. Berdasarkan evaluasi di Kecamatan Bengkalis, pelaksanaan program ini dinilai cukup efektif dengan proses administratif yang relatif mudah, dimana warga hanya diwajibkan menyerahkan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga.¹³ Dalam proses penyalurannya, Dinas Sosial melakukan validasi terhadap data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bahwa bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria.

Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) menyalurkan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah yang wajib mengikuti pendidikan serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas layanan kesehatan.¹⁴ Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang optimal membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemantauan rutin guna menjamin bahwa bantuan diterima oleh pihak yang berhak.

Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi langsung kepada masyarakat yang terdampak kebijakan ekonomi tertentu, seperti kenaikan harga bahan minyak.¹⁵ Agar bantuan ini dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat, maka diperlukan proses identifikasi yang akurat terhadap keluarga miskin. Namun demikian, beberapa penelitian mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaannya, di mana sejumlah warga miskin justru tidak memperoleh bantuan sebagaimana mestinya.¹⁶

Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bantuan sosial bagi para pekerja dengan penghasilan tertentu, khususnya orang-orang yang terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).¹⁷ Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja formal yang terdampak oleh tekanan ekonomi nasional. Penyaluran bantuan tersebut umumnya melalui proses verifikasi dan seleksi yang ketat agar hanya pekerja yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat menerima manfaat. Namun, studi-studi sebelumnya mencatat bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi demi meningkatkan pemerataan dan efektivitasnya.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk bantuan sosial memerlukan sistem penyaluran yang terstruktur dan terintegrasi untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap penyalurannya. Sejumlah penelitian juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program bantuan sosial, guna memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁸

Analisis Perbedaan Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial

Distribusi bantuan sosial adalah salah satu strategi perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kerentanan ekonomi, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Tingkat keberhasilan penyaluran bantuan ini sangat bergantung pada kondisi geografis dan sosial masing-masing wilayah, karena setiap daerah—baik kota maupun desa—memiliki kebutuhan, tantangan, dan kapasitas administratif yang berbeda-beda.

¹³ Ahmad Firdaus, Sujianto Sujianto, and Febri Yuliani, "Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi," *Neorespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 113–23, <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.36>.

¹⁴ Intan P Pertiwi, F X Ferdinandus, and Arthur D Limantara, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting," *Cahaya tech* 8, no. 2 (2019): 182, <https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.46>.

¹⁵ Franciscus A Prasetyo et al., "Masalah Dan Rekomendasi Bantuan Sosial : Studi Kasus Program Bantuan Sosial Kompensasi BBM Di Kabupaten Jember," *Share Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 52, <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.45720>.

¹⁶ Anna Z Wahidah et al., "Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid -19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar," *Competence Journal of Management Studies* 16, no. 1 (2022): 51–63, <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429>.

¹⁷ Hartini Retnaningsih, "Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah," *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 215–27, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>.

¹⁸ Wildan Rahmansyah et al., "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)* 2, no. 1 (2020): 90–102, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>.

Kota Bandung; Efisiensi Teknologi dengan Ketidaktepatan Sasaran Infrastruktur dan Digitalisasi

Kota Bandung telah mengalami kemajuan dalam infrastruktur teknologi, yang memfasilitasi penyaluran bantuan sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH), secara elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dompet digital. Selain itu, Dinas Sosial Kota Bandung juga menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam mengelola data penerima bantuan.

Namun, meskipun penggunaan teknologi mempercepat distribusi bantuan, validitas data masih menjadi masalah. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan ketidaktepatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana banyak warga yang layak tidak tercatat, sementara yang tidak memenuhi syarat justru masuk dalam daftar penerima.¹⁹

Ketepatan Sasaran dan Pengawasan Sosial

Di kawasan perkotaan, tingkat kohesi sosial biasanya lebih rendah. Interaksi antarwarga yang bersifat individualistik membuat kontrol sosial terhadap penyaluran bantuan sosial menjadi kurang efektif. Orang-orang yang menerima bantuan tanpa memenuhi syarat jarang mendapat teguran dari tetangganya. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data sering dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam data tetap tinggi.

Ketepatan sasaran serta pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Bandung menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas program perlindungan sosial. Sebagai kota metropolitan dengan kondisi sosial ekonomi yang dinamis dan beragam, Bandung dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjamin bantuan telah diterima sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan dan proses penyalurannya diawasi secara maksimal.

Termasuk tantangan utama yang dihadapi adalah akurasi data penerima bantuan. Meskipun Dinas Sosial Kota Bandung secara rutin memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih sering terjadi ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Contohnya, dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), kita sering menemukan kasus di mana individu yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan, sementara warga yang seharusnya berhak malah tidak terdaftar sebagai penerima.

Pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial juga menjadi fokus penting. DPRD Kota Bandung telah menyoroti perlunya pengawasan yang ketat, khususnya dalam program bantuan seperti dana bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Tindakan ini dilakukan guna memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang berhak, serta menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.²⁰

Studi Kasus

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, mengungkapkan bahwa meskipun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dijalankan secara digital, masih terdapat kendala utama terkait ketepatan sasaran. Ditemukan bahwa sejumlah warga yang terpengaruh secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 tidak menerima bantuan, karena nama mereka tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, ada penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap memperoleh BPNT. Keadaan ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem seleksi dan pembaruan data penerima di tingkat lokal.²¹

Permasalahan yang muncul mencerminkan tantangan struktural yang lebih besar dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di berbagai wilayah perkotaan, seperti di Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi BPNT belum mencapai optimalitas. Beberapa hambatan yang mencolok antara lain ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan dalam proses penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta kondisi saldo yang bernilai nol pada kartu milik Keluarga Penerima Manfaat

¹⁹ Liputan6, "Memahami DTKS: Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," Liputan6, 2024.

²⁰ Dprdbandung, "Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Bandung," dprdbandung, n.d.vv

²¹ Latifah, "EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIHAMPELAS KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT," *Jurnal Praxis Idealis; Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 02, no. 01 (2025).

(KPM), yang menyebabkan mereka tidak bisa mencairkan bantuan. Selain itu, minimnya sosialisasi membuat banyak warga belum memahami sepenuhnya mekanisme dan tujuan program, sehingga efektivitas bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga mencerminkan pola yang serupa secara nasional. Berdasarkan data survei, sekitar 13,9% keluarga penerima manfaat menyatakan bahwa penyaluran BPNT tidak tepat sasaran atau setidaknya kurang tepat. Ketidakpuasan ini muncul karena sebagian warga merasa bahwa terdapat individu atau keluarga lain di lingkungan mereka yang kondisinya lebih layak untuk menerima bantuan dibandingkan dengan penerima aktual. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme seleksi dan pembaruan data penerima manfaat yang seharusnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat dan terkini.

Kabupaten Bandung: Partisipasi Komunitas dengan Keterbatasan Infrastruktur **Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas**

Pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Bandung masih mengalami berbagai kendala, khususnya terkait dengan keterbatasan infrastruktur serta sulitnya akses di daerah pedesaan dan kawasan perbukitan. Walaupun program-program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan BLT Dana Desa telah mencakup sebagian besar warga, implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh kondisi fisik dan geografis wilayah tersebut.

Keterbatasan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas di Kabupaten Bandung menjadi tantangan besar yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah pinggiran. Walaupun wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, ketimpangan dalam pengembangan infrastruktur dasar tetap menjadi kendala utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata.²²

Keadaan ini semakin kompleks dengan minimnya jaringan transportasi umum di desa-desa terpencil, yang menyebabkan kesulitan bagi warga dalam mengakses lokasi penyaluran bantuan seperti kantor pos, e-warung, atau balai desa. Kesulitan ini sangat dirasakan oleh kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu tunggal yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi, sehingga partisipasi mereka dalam program bantuan sosial menjadi terhambat.

Selain kendala transportasi, akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi tantangan besar dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah pedesaan. Di tengah tren digitalisasi, seperti pencairan bantuan melalui kartu elektronik atau aplikasi, masih banyak warga desa yang belum memahami cara menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara optimal. Hambatan ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap internet dan kepemilikan perangkat seperti smartphone. Di beberapa daerah, bahkan jaringan sinyal telekomunikasi masih lemah atau tidak tersedia, sehingga menyulitkan proses transaksi elektronik maupun verifikasi data penerima bantuan.

Pendekatan Komunitas dan Musyawarah Desa

Pendekatan berbasis komunitas dan mekanisme musyawarah desa menjadi instrumen kunci dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bandung. Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, ikut berperan dalam proses penentuan kebijakan dan penerima bantuan secara bersama-sama. Partisipasi aktif masyarakat ini menciptakan transparansi serta meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil. Mengingat karakteristik Kabupaten Bandung yang didominasi wilayah perdesaan dan semi-perdesaan, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau kelompok rentan karena memungkinkan identifikasi kondisi sosial-ekonomi warga secara langsung dan kontekstual, dibandingkan semata-mata mengandalkan data administratif pusat.

Studi Kasus

Penelitian di Kabupaten Bandung mengindikasikan bahwa mekanisme musyawarah desa terbukti efektif dalam menetapkan penerima bantuan sosial secara tepat sasaran. Melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), pemerintah desa bersama unsur masyarakat secara kolektif merumuskan kebijakan penting, termasuk dalam proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

²² Made Anthony Iswara, "Menelusuri Jejak Bantuan Pangan Dalam Menyokong Penduduk Miskin," *tirto.id*, 2021.

(BLT-DD). Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif ini tidak hanya mendorong keterbukaan dan tanggung jawab, tetapi juga memperkuat keterikatan warga terhadap pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal.

Meski pendekatan partisipatif telah memperkuat penyaluran bantuan sosial, hambatan logistik dan infrastruktur tetap menjadi tantangan utama, khususnya di wilayah terpencil Kabupaten Bandung. Di daerah-daerah seperti Pangalengan, Cimaung, dan Kertasari, akses jalan yang rusak, sempit, belum beraspal, atau rawan longsor saat musim hujan sering kali menghambat distribusi bantuan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan penyaluran dan, dalam banyak kasus, bantuan tidak dapat diantar langsung ke rumah warga. Sebagai gantinya, bantuan harus dikumpulkan di lokasi tertentu yang berfungsi sebagai titik distribusi kolektif, yang sering kali berjarak cukup jauh dari permukiman warga, sehingga menyulitkan terutama bagi kelompok rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas.²³

Situasi ini semakin diperburuk oleh minimnya ketersediaan transportasi umum di desa-desa terpencil, yang mengakibatkan kesulitan bagi warga dalam mengakses lokasi penyaluran bantuan seperti kantor pos, e-warong, atau balai desa. Ketergantungan pada kendaraan pribadi menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu tunggal yang tidak memiliki sarana transportasi. Akibatnya, banyak dari mereka yang kesulitan menjangkau titik distribusi bantuan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan bantuan tidak tersalurkan secara optimal kepada pihak yang membutuhkan.

Di samping hambatan fisik dan logistik, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi tantangan besar dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah pedesaan. Dalam konteks digitalisasi sistem bantuan seperti pencairan dana melalui kartu elektronik atau aplikasi banyak warga desa yang belum memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau bahkan tidak memiliki akses ke perangkat pendukung seperti smartphone dan koneksi internet. Di sejumlah wilayah, infrastruktur telekomunikasi pun masih terbatas; sinyal seluler lemah atau tidak tersedia sama sekali, sehingga menghambat proses transaksi elektronik dan pembaruan data secara daring. Keadaan ini semakin memperbesar kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, terutama dalam akses terhadap layanan sosial berbasis teknologi.

Perbandingan Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 4. Perbandingan Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial

Aspek	Kota Bandung	Kabupaten Bandung
Infrastruktur Teknologi	Maju, digitalisasi tinggi	Terbatas, digitalisasi rendah
Ketepatan Sasaran	Rendah, data sering tidak akurat	Tinggi, melalui musyawarah desa
Pengawasan Sosial	Lemah, individualistik	Kuat, berbasis komunitas
Aksesibilitas	Baik, jaringan transportasi luas	Terbatas, terutama di daerah terpencil
Literasi Digital	Tinggi dikalangan muda	Rendah di beberapa wilayah

Beban Fiskal Negara Dengan Adanya Kebijakan Bantuan Sosial

Terdapat besaran beban fiskal tahun ke tahun dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi kebutuhan. Secara umum kebijakan fiskal dilakukan melalui instrumen dalam pajak dan dalam belanja pemerintah. Beban fiskal ini melonjak ketika Indonesia melewati masa pandemi dengan menggunakan bantuan sosial untuk menangani masyarakat yang terkena musibah, bantuan sosial didapatkan dari pajak serta belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan disaat pandemi berlangsung.²⁴

²³ Ilham Gemiharto and Elfira Rosa Juningsih, "Komunikasi Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Manajemen Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>.

²⁴ Vera Lisna et al., "Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 14, no. 1 (2013): 1–26, <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.01>.

Dimulai pada tahun 2020, realisasi anggaran bantuan sosial yang digunakan mencapai sekitar Rp202,5 triliun atau sekitar 1,31% pada Produk Domestik Bruto²⁵. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator ekonomi yang paling penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara. PDB tidak hanya berfungsi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing negara tersebut dibandingkan dengan negara lainnya.²⁶

Pada saat masa pandemi, pemerintah telah menyiapkan dalam hal anggaran perlindungan sosial dengan nominal sebesar Rp110 triliun dengan program yang sudah jelas arahnya yaitu untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang ditingkatkan semasa pandemi menggunakan sekitar Rp65 triliun APBN. Maka dari APBN yang tersedia, anggaran memiliki banyak ruang tersisa untuk menyalurkan dana sosial. Namun, Kementerian Keuangan tetap menjaga defisit APBN di angka 5,07%.²⁷

Pada tahun 2021 pandemi mulai semakin darurat, alokasi untuk penganggaran perlindungan sosial dalam APBN mencapai Rp408,8 triliun dengan kemungkinan realisasi mencapai nominal sekitar Rp491,5 melebihi anggaran yang sudah tersedia dan di rencanakan untuk tahun 2021 dari APBN untuk perlindungan sosial, hal tersebut menjadi beban fiskal negara Indonesia.²⁸

Terdapat dampak besar yang juga muncul dari adanya peningkatan beban fiskal karena seiring adanya perluasan serta peningkatan alokasi dari bantuan sosial. Terutama jika digunakan dalam pemberian dana untuk situasi darurat seperti pandemi, perlambatan ekonomi secara global dan terjadi musibah besar yang menyangkut dengan bantuan sosial.

Beban fiskal ini juga memiliki risiko menimbulkan masalah mengenai tata kelola jika tidak di arahkan dan di atur dengan benar serta sesuai. Seperti ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, penyalahgunaan dana yang sudah diberikan dengan tujuan yang seharusnya, dan terjadinya kelemahan pengendalian internal yang beberapa kali ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pelaksanaan bantuan sosial tahun 2020 lalu.

Banyak cara pengelolaan beban fiskal yang mulai di jalankan oleh pemerintah upaya untuk peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam hal penyaluran bantuan sosial. Seperti melalui perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penyederhanaan dalam sistem penyaluran bantuan sosial, transparansi dan juga akuntabilitas agar tidak terjadi hal negatif serta merugikan banyak pihak terkait termasuk merugikan negara serta APBN. Adapun bantuan sosial dapat di satu padukan dengan kebijakan lainnya seperti subsidi serta perpajakan untuk menjaga stabilitas negara dalam lingkup ekonomi dan dapat mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.²⁹

Evaluasi Bantuan Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah permasalahan kompleks yang memiliki banyak dimensi dan telah menjadi sorotan utama kebijakan sosial di Indonesia sejak lama. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang miskin dan rentan. Di antara program-program tersebut terdapat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Sembako merupakan beberapa inisiatif penting dalam penanganan kemiskinan. Karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program-program ini sangat diperlukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial yang terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan

²⁵ Martha Carolina and Mutiara Shinta Andini, "Tantangan Bantuan Sosial Sebagai Bagian Extraordinary Policy Responses Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," *Analisis RKP Dan Pembicaraan Pendahuluan APBN* 03, no. VI (2021): 1–23.

²⁶ CIMA NIAGA, "Apa Itu PDB?," n.d.

²⁷ Badan Kebijakan Fiskal, "Pemerintah Upayakan Bantuan Sosial Efektif Dan Tepat Sasaran Di Masa Pandemi Covid-19," n.d.

²⁸ "Anggaran Penanganan Covid-19 Dan PEN Naik, Beban Fiskal Kian Berat," *Tempo*, n.d.

²⁹ Fiskal, "Pemerintah Upayakan Bantuan Sosial Efektif Dan Tepat Sasaran Di Masa Pandemi Covid-19."

yang signifikan sejak program ini berjalan dari 16,58% pada tahun 2007 menjadi 9,78% pada tahun 2020³⁰. Ini membuktikan bahwa PKH memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga-keluarga miskin. BPNT memberikan dukungan dalam bentuk saldo sistem elektronik ini memungkinkan penerima bantuan untuk membeli bahan pangan di e-warung resmi yang telah ditunjuk. Program ini bertujuan untuk membuat penyaluran bantuan pangan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu.³¹ Evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) menunjukkan bahwa program ini berhasil membantu mengurangi beban biaya keluarga miskin sekaligus memperbaiki akses mereka terhadap makanan bergizi.

Namun, meskipun program-program bansos tersebut telah memberikan dampak positif, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan hasil survey dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2020, hampir setengah dari responden, tepatnya 49% merasa bahwa bantuan sosial yang diterima belum sampai ke pihak yang seharusnya. Di sisi lain, hanya 37% responden yang berpendapat bahwa bantuan tersebut telah mencapai target yang diharapkan³². Masalah ini muncul karena data yang digunakan kurang akurat dan jarang diperbarui secara berkala, baik di level daerah atau nasional.

Selain ketidaktepatan sasaran, terdapat juga masalah lain yang kerap muncul, seperti ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan, lambatnya proses distribusi, serta praktik penyelewengan dana dan pungutan liar. Isu-isu tersebut mengurangi efektivitas program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Sebagai ilustrasi, selama penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19, sempat terungkap adanya penyalahgunaan dana bantuan oleh oknum pejabat tingkat pusat. Situasi semacam ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta diperlukan transparansi dalam proses penyaluran bantuan.

Untuk meningkatkan efektivitas program bansos, pemerintah telah melakukan berbagai upaya evaluasi dan perbaikan. Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan pengawasan dan penilaian secara berkala terhadap jalannya berbagai program bantuan sosial untuk memastikan efektivitas dan ketepatannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan program bantuan sosial di Indonesia³³. Salah satu langkah yang diambil adalah pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk memastikan data penerima bantuan selalu akurat dan up-to-date.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong sinergi dan komplementaritas antara berbagai program dan lembaga terkait bertugas memastikan agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan, disalurkan tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Diharapkan, adanya monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antarprogram dapat meningkatkan efektivitas intervensi dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem³⁴. Pemerintah juga telah meluncurkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian finansial keluarga penerima manfaat melalui pemberian modal usaha. Program ini terbukti berhasil meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial.³⁵

Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, Keberhasilan upaya ini menuntut peran aktif dari beragam pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga keterlibatan langsung masyarakat luas. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data penerima bantuan selalu akurat dan up-to-date, serta dalam melakukan pengawasan

³⁰ "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen," badan pusat statistik, 2020.

³¹ peraturan menteri sosial, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai," 2019.

³² Yulida Medistiara, "Survei SMRC: 49 Persen Warga Nilai Bansos Corona Belum Tepat Sasaran," detik news, 2020.

³³ "Transformasi Program Bantuan Sosial Di Indonesia Memastikan Mendukung Tujuan Pembangunan Dan Secara Dinamis Merespon Krisis Saat Ini Dan Masa Depan," KEMENKO PMK, 2024.

³⁴ "Kemendagri PMK Gelar Monitoring Terpadu Untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen," KEMENKO PMK, 2023.

³⁵ "Tingkat Keberhasilan PENA Kemensos 98,9%," KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2023.

terhadap penyaluran bantuan di wilayahnya. Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak yang mereka miliki serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menerima bantuan sosial, serta dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program bansos. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi dan validasi data, serta dalam melaporkan apabila terdapat penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Dalam jangka panjang, program bantuan sosial sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sementara, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui beragam langkah dan pendekatan yang berbeda, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta akses terhadap layanan keuangan dan pasar. Dengan pendekatan ini, program bantuan sosial, Program ini tak hanya berperan sebagai perlindungan sosial tetapi juga menjadi sarana untuk memberdayakan dan meningkatkan potensi serta produktivitas masyarakat yang kurang beruntung.

SIMPULAN

Kebijakan bantuan sosial (bansos) di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan efektivitas berkat sejumlah perbaikan. Ini termasuk penyempurnaan dalam desain program, pemanfaatan teknologi digital untuk proses distribusi, serta pengoptimalan metode penetapan sasaran yang berbasis data dan pendekatan berbasis komunitas. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang untuk lebih tepat dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan. Dukungan dari sistem elektronik seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin memperkuat sasaran bantuan tersebut.

Walaupun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam kebijakan bantuan sosial, tantangan pelaksanaannya masih tetap ada. Di kawasan perkotaan seperti Kota Bandung, masalah utama terkait dengan validitas data penerima bantuan, yang dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk dan perubahan status sosial-ekonomi. Sementara itu, di daerah pedesaan seperti Kabupaten Bandung, masalah besar yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi, yang memperlambat atau menyulitkan distribusi bantuan. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti musyawarah desa, dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran, terutama di daerah pedesaan, karena memungkinkan identifikasi penerima bantuan yang lebih akurat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, bantuan sosial (bansos) berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, namun turut membawa dampak pada peningkatan beban fiskal negara. Untuk itu, reformasi kebijakan bansos harus difokuskan pada peningkatan efisiensi, penguatan sistem pengelolaan, dan pengendalian beban fiskal agar kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi solusi perlindungan sosial yang berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang.

Penilaian kebijakan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan berbasis komunitas telah meningkatkan akurasi distribusi bantuan sosial. Namun, tantangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, data tumpang tindih, dan lemahnya pengawasan masih ada. Solusinya meliputi peningkatan transparansi sistem pendataan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan literasi digital penerima bantuan. Secara umum, kebijakan bansos 2024 semakin terarah dan responsif, namun tata kelola yang lebih baik dan keberlanjutan masih menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan secara optimal di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan material terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana

REFERENSI

Atika, Maya. "Mensos Tri Rismaharini: Verifikasi DTKS Diperbarui Setiap Bulan Demi Tepatnya

- Penyaluran Bantuan Sosial.” demakbicara.com, 2024.
- badan pusat statistik. “Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Provinsi, 2023,” n.d.
- badan pusat statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen,” 2020.
- BADAN PUSAT STATISTIK. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen,” 2024.
- Carolina, Martha, and Mutiara Shinta Andini. “Tantangan Bantuan Sosial Sebagai Bagian Extraordinary Policy Responses Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.” *Analisis RKP Dan Pembicaraan Pendahuluan APBN* 03, no. VI (2021): 1–23.
- CIMB NIAGA. “Apa Itu PDB?,” n.d.
- Dprdbandung. “Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Bandung.” dprdbandung, n.d.
- Firdaus, Ahmad, Sujianto Sujianto, and Febri Yuliani. “Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi.” *Neorespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 113–23. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.36>.
- Fiskal, Badan Kebijakan. “Pemerintah Upayakan Bantuan Sosial Efektif Dan Tepat Sasaran Di Masa Pandemi Covid-19,” n.d.
- Gemiharto, Ilham, and Elfira Rosa Juningsih. “Komunikasi Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Manajemen Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>.
- Hukum, Info. “Alur Pemberian Bantuan Sosial (Bansos): Proses, Tahapan, Dan Mekanisme Penyaluran.” info hukum, n.d.
- indonesia baik. “Bantuan Sosial Di Tahun 2024,” 2024. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/bantuan-sosial-di-tahun-2024>.
- Iswara, Made Anthony. “Menelusuri Jejak Bantuan Pangan Dalam Menyokong Penduduk Miskin.” *tirto.id*, 2021.
- Kartika, Mimi. “Empat Menteri Respons Soal Penyaluran Bansos.” *mkri.id*, 2024.
- KEMENKO PMK. “Kemenko PMK Gelar Monitoring Terpadu Untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen,” 2023.
- KEMENKO PMK. “Transformasi Program Bantuan Sosial Di Indonesia Memastikan Mendukung Tujuan Pembangunan Dan Secara Dinamis Merespon Krisis Saat Ini Dan Masa Depan,” 2024.
- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA. “Tingkat Keberhasilan PENA Kemensos 98,9%,” 2023.
- Latifah. “EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIHAMPELAS KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT.” *Jurnal Praxis Idealis; Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 02, no. 01 (2025).
- Liputan6. “Memahami DTKS: Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.” *Liputan6*, 2024.
- Lisna, Vera, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus, and Slamet Sutomo. “Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 14, no. 1 (2013): 1–26. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.01>.
- Mangeswuri, Dewi Restu. “Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengendalian Inflasi.” *Info Singkat* 16, no. 3 (2024).
- Medistiara, Yulida. “Survei SMRC: 49 Persen Warga Nilai Bansos Corona Belum Tepat Sasaran.” *detik news*, 2020.
- Mijensmg. “Sering Dengar Kata ‘BANSOS’ ? Apa Itu ‘BANSOS’ ?” *mijen semarang kota*, 2024.
- Ombudsman RI. “Problematika Bantuan Sosial Dan DTKS,” 2024.
- Pertiwi, Intan P, F X Fedinandus, and Arthur D Limantara. “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting.” *Cahayatech* 8, no. 2 (2019): 182. <https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.46>.
- Prasetyo, Franciscus A, Nur D Gianawati, Kusuma Wulandari, Wahyuni Mayangsari, and Saridewi Purwantini. “Masalah Dan Rekomendasi Bantuan Sosial : Studi Kasus Program Bantuan Sosial Kompensasi BBM Di Kabupaten Jember.” *Share Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 52. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.45720>.

- Rahmansyah, Wildan, Resi A Qadri, R T S R A Sakti, and Syaiful Ikhsan. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)* 2, no. 1 (2020): 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>.
- Rahmawati, Dwi. "Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos Melonjak Tajam Jadi Rp 22,5 T Pada 2024." detik news, n.d.
- Retnaningsih, Hartini. "Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah." *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 215–27. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>.
- Sari, Brigitta Belia Permata. "Risma Jelaskan Alasan Bansos 2023 Tak Cair Januari-Ferbuari Seperti 2024." detik news, n.d.
- Sitorus, Sean Anggiatheda. "Pengertian Bansos, Jenis Dan Tujuannya." antara news, 2024.
- Tempo. "Anggaran Penanganan Covid-19 Dan PEN Naik, Beban Fiskal Kian Berat," n.d.
- Wahidah, Anna Z, Anna Widayani, Shanti I Wardani, Ika Rachmawati, and Nunuk Latifah. "Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid -19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar." *Competence Journal of Management Studies* 16, no. 1 (2022): 51–63. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429>.